

## NOTULA

- Rapat : Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia tentang Dukungan Pengelolaan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan
- Tanggal : 9 Agustus 2022
- Waktu : 13.00 - selesai
- Tempat : Ruang Rapat Gedung D lantai 8 Kementerian Pertanian
- Pimpinan : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Peserta : 1. Paban I/Ren Ster TNI  
2. Paban II/Puanter Ster TNI  
3. Paban III/Tahwil Ster TNI (yang mewakili)  
4. Paban IV/Komsos Ster TNI  
5. Paban V/Bakti TNI Ster TNI  
6. Staf TNI AD  
7. Staf TNI AU  
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
9. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan  
10. Direktur Pembiayaan  
11. Subkoordinator Subkelompok Hukum dan Humas  
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (yang mewakili)

### Hasil Rapat:

1. Perluasan tanam kedelai melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. *Mapping resource* antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia
  - Sasaran lokasi dibedakan berdasarkan komoditas di Direktorat komoditi;

- Pembiayaan difasilitasi dengan KUR berdasarkan komoditas, melalui tahapan CPCL dan seterusnya di lahan TNI;
  - Irigasi untuk kebutuhan pengairan lahan; dan
  - Pupuk cair organik.
3. Sekretariat Jenderal Kementan yang mengkoordinasikan untuk kerangka dasar Kerja Sama dengan TNI di setiap eselon I lingkup Kementan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, fungsi dan kewenangan.
  4. Diharapkan kerja sama dengan TNI dapat meningkatkan kinerja kementan dengan *output* yang dapat bermanfaat untuk masyarakat
  5. Pemetaan lahan di masing-masing instansi agar di sinkronisasikan.
  6. Data dari TNI agar disampaikan ke Direktorat Teknis untuk di tindaklanjuti implementasi kerja sama sesuai dengan kebutuhan komoditasnya.
  7. Besaran intensif untuk pendampingan disesuaikan di setiap eselon I lingkup kementan.
  8. Perlu konsolidasi di masing-masing instansi agar terkoordinir oleh satu arahan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, fungsi, dan kewenangan, dalam hal ini di koordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementan.
  9. Karena saat ini sudah memasuki TW II, agar fokus di *pilot projet* lahan yang sudah siap.